

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI RSUD GUNUNG TUA KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA

Khairul Imam Siregar

NPP. 29.0132

Asdaf Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera utara

Program Studi Keuangan Publik

Email: imamanak1@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Baackground (GAP): The author focuses on the North Padang Lawas Regency Government taking action to procure goods and services to accelerate the handling of the Covid-19 pandemic by following the LKPP Circular Letter No. 3 of 2020 and Minister of Health Regulation No. 7 of 2020 concerning Importation of Health Aid through the Special Line Mechanism. The **purpose** of this Final Report is to know how the implementation of procurement of goods and service policy during covid-19 pandemic at Gunung Tua hospital, constraints and effort made by Gunung Tua hospital that used on implementation of procurement of goods and service policy during covid-19 pandemic at Gunung Tua hospital. This research based on theory of Edwards III (Agustino, 2019:136) it consists of communication, resources, disposition, and organizational structure. **Methods** used in this Final Report is descriptive method with inductive approach, while the data collection techniques used were through interviews and documentation. In analyzing data authorization uses the triangulation method, which ensures the validity of the data or information obtained from various sources or different points of view. **Results/Findings** results of the research show that in general, the implementation of procurement of goods and services in accordance with the guidelines that have been set but at the beginning of the order was constrained because of goods that are difficult to obtain and rare. Constraints made by Gunung Tua hospital obtained is in the status of hospitals that are still not BLU resulting in a long disbursement process, goods that are rare and difficult to obtain. There are still many employees who are not experts in the field of procurement of goods and services due to limited human resources development, the recording of supplies of distributed goods is not well controlled. **Conclusion** the implementation of the policy on the procurement of goods/services during the covid-19 pandemic at the gunung tua hospital, north padang lawas regency, north Sumatra province has not been effective. The efforts are to speed up the management of BLU status process, improve assertiveness to improve human resources performance and evaluate the distribution and recording of inventory of goods.

Keywords: Policy Implementation, Procurement of Goods and Service, Covid-19

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara mengambil tindakan untuk melakukan pengadaan barang dan jasa untuk percepatan penanganan pandemi Covid-19 dengan mengikuti mekanisme Surat Edaran LKPP Nomor 3 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pemasukan Alat Kesehatan Melalui Mekanisme Jalur Khusus. Penelitian ini **bertujuan** untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan implementasi pengadaan barang dan jasa selama masa pandemi Covid-19 di RSUD Gunung Tua, kendala serta upaya yang dilakukan RSUD Gunung Tua dalam melaksanakan implementasi pengadaan barang dan jasa pada masa pandemi Covid-19 di RSUD Gunung Tua. Penelitian ini berdasarkan teori Edwards III (dalam buku Agustino, 2019:136) yaitu komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Organisasi. **Metode** yang digunakan untuk kegiatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah wawancara/interview, dokumentasi dan Triangulasi (gabungan) dokumentasi. Teknik analisis data dengan cara reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis dapat **Hasil/Temuan** bahwa secara umum Pelaksanaan Implementasi Pengadaan barang dan jasa sudah sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan, namun diawal pemesanan sempat terkendala karena barang yang sulit didapatkan dan langka. Kendala yang didapatkan RSUD Gunung Tua yaitu pada status RSUD yang masih belum BLU mengakibatkan proses pencairan dana yang panjang, barang yang langka atau sulit didapatkan, Masih banyak pegawai yang belum ahli di bidang pengadaan barang dan jasa dikarenakan Pembinaan SDM yang terbatas, Pencatatan persediaan barang yang untuk di distribusikan tidak terkontrol dengan baik. **Kesimpulan** Implementasi kebijakan pengadaan barang/jasapada masa pandemic covid-19 di rsud gunung tua kabupaten padang lawas utara provinsi sumatera utara belum efektif. Upaya yang dilakukan yaitu mempercepat pengurusan proses status BLU, meningkatkan ketegasan untuk meningkatkan kinerja SDM dan melakukan evaluasi terhadap pendistribusian dan pencatatan persediaan barang.

Kata kunci :implementasi kebijakan, pengadaan barang dan jasa,covid-19

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan untuk penanggulangan pandemi Covid-19, yaitu pada Tanggal 20 Maret Tahun 2020 Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo menandatangani Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Maka Presiden memfokuskan anggaran sebesar Rp.56.570.000.000.000, yang dirincikan kedalam tiga pos penanganan kesehatan Rp.24.100.000.000.000, penanganan dampak ekonomi Rp.7.130.000.000.000 dan penyediaan jaringan pengamanan sosial berjumlah Rp.25.340.000.000.000.

MeIalui informasi yang diterima Iangsung dari Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Gunung tua mengatakan dalam pengadaan barang dan jasa untuk penanganan Covid-19 bersumber dari beberapa jenis anggaran yaitu Anggaran PBJ dari DAK berjumlah Rp.5.000.000.000, dari *refocusing* APBD berjumlah Rp. 1. 049. 000. 000 dan dari BTT berjumlah Rp. 2. 400. 000. 000. Menurut informasi dari Iaporan penggunaan APBD pada RSUD Gunung tua, RSUD Gunung tua telah melakukan Pengadaan Barang dan Jasa untuk menangani pandemi Covid-19 yang terinci pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.1
Refocusing Anggaran Tahun 2020 RSUD Gunung Tua

NO	Program/Kegiatan	Sebelum Refocusing (Rp)	Setelah Refocusing (Rp)	Realisasi(Rp)	Selisih Persentase(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana rumah sakit	1. 049. 000. 000			29
a	Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit	400. 000. 000			
b	Pembangunan Gapura Rumah Sakit	200. 000. 000			
c	Pembuatan Taman Jalan Rumah Sakit	200. 000. 000			
d	Pengadaan Alat Kedokteran umum	649. 000. 000			
	Pengadaan Alat-alat Kesehatan rumah sakit		1. 049. 000. 000	743. 362. 500	
II	Program Pelayanan Rujukan (DAK)	5. 000. 000. 000	5. 000. 000. 000	5. 000. 000. 000	0
a	Pembangunan lanjutan lantai 2 Gedung Rawatan Umum dan Kebidanan Kelas 1, 2, 3	5. 000. 000 .000	5. 000. 000. 000	5. 000. 000. 000	

III	Pembangunann /Rehab Ruang Isolasi TekananNegatif (RITN) beserta kelengkapannya	6. 049. 000. 000			
a	RuangRehablsolasi COVID19		808. 500. 000	808. 500. 000	0
b	-Hefafilter		1. 533. 061. 460	1. 533. 061. 460	0
c	-Instalasi listrik Ruang Isolasi dankelengkapannya		158. 438. 540	158. 438. 540	0
d	Pengadaan X RayPortable		2. 500. 000. 000	2. 500. 000. 000	0
	JUMIAH	6. 049. 000. 000	6. 049. 000. 000	5. 743. 362. 500	5.05

Sumber : RSUD Gunung Tua

Berdasarkan tabel di atas dapat di jelaskan program/kegiatan yang di masukkan ke dalam dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020sebelum *refocusing* total anggaran untuk pengadaan barang di RSUD Gunung Tua berjumlah Rp.6.049.000.000 lalu setelah di *refocusing* anggaran untuk pengadaan barang dan jasa dialihkan untuk pengadaan barang dalam rangka penanganan pandemi Covid-19. Ternyata berdasarkan table diatas menyampaikan selisih persentase realisasi pengadaan barang dari hasil *refocusing* adalah 5.05 % artinya anggaran yang terrealisasi sudah hampir mencapai 95 % yang tentunya anggaran pengadaan barang dalam penanganan Covid-19 sudah terlaksana.

Persentase realisasi anggaran untuk pengadaan barang tersebut penulis mengkategorikan sudah cukup tinggi, RSUD Gunung Tua juga telah melaksanakan rencana untuk melakukan pengadaan barang/jasa untuk penanganan Covid-19 yang telah dimasukkan ke dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) RSUD Gunung Tua sebagai berikut:

Table 1.2
Rancangan Kerja Anggaran Penanganan Covid-19

No.	Kegiatan	Total Anggaran (Rp)
1.	Obat-obatan	99.100.000
2.	Alat Pelindung Diri	950.704.720
3.	Cairan Desinfektan	101.500.00
4.	Alat Semprot Desinfektan	20.000.000
5.	Pengadaan BHP	499.675.000
6.	Sepatu Boot	49.808.000
7.	Pengadaan BMHP	213.500.000
8.	Rapid Test	297.000.000
9.	Alkes Pendukung (temp.Gun)	33.660.000
10.	Plastik Limbah Medis Covid	19.920.000
11.	Kantong Zenazah	2.200.000
12.	Peti Jenaza	40.000.000
13.	Aerosol Box	4.500.000
14.	Pembatas Pasien dengan Petugas	44.377.000
15.	Media Publikasi/Informasi	1.750.000
16.	Brankar Pasien Isolasi	70.000.000
	Jumlah	2.447.694.720

Banyak pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan oleh RSUD Gunung Tua, namun apakah mekanisme yang dilaksanakan sudah sesuai dengan amanat yang disampaikan pada Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pemasukan Alat Kesehatan Melalui Mekanisme Jalur Khusus. Tentunya menjadi sebuah hal menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian terkait mekanisme pengadaan barang jasa tersebut yang didorong dengan dikeluarkannya Surat Edaran LKPP Nomor 3 Tahun 2020

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Banyak pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan oleh RSUD Gunung Tua, namun apakah mekanisme yang dilaksanakan sudah sesuai dengan amanat yang disampaikan pada Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pemasukan Alat Kesehatan Melalui Mekanisme Jalur Khusus. Selain itu terdapat berbagai permasalahan lainnya, seperti status RSUD Gunung Tua yang belum BLU, Masih banyak pegawai yang belum ahli di bidang pendapatan barang dan jasa dikarenakan pembinaan SDM yang terbatas serat pencatatan persediaan barang yang untuk di distribusikan tidak terkontrol dengan baik. Tentunya menjadi sebuah hal menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian terkait mekanisme pengadaan barang jasa tersebut yang didorong dengan dikeluarkannya Surat Edaran LKPP Nomor 3 Tahun 2020.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu tentang kinerja Pengadaan barang/jasa pada masa pandemic covid-19. Penelitian syhairul alim berjudul Analisis yang memengaruhi kinerja pengadaan barang/jasa dalam keadaan darurat wabah covid-19 dengan social distancing sebagai variable moderator (syahirul Alim, 2018) yang menggunakan metode penelitian Kualitatif. Penelitian ini menunjukkan Menunjukkan bahwa kebijakan social distancing yang diterapkan pemerintah tidak memperlemah kinerja pangadaan barang/jasa dalam keadaan darurat. Penelitian Irfan marzuki yang berjudul Pengadaan alat Kesehatan sebagai upaya percepatan penanganan covid-19 menemukan bahwa Dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, dalam pelaksanaannya harus mengedepankan prinsip value for money. Penelitian Deby Trisiati yang berjudul Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 menemukan Para pihak yang terlibat dalam pengadaan ini wajib mematuhi etika pengadaan dengan tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif – kualitatif.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian deskriptif-kualitatif. Penulis menggunakan konsep teori Edward III yang terdiri dari Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi.

Perbedaan lainnya adalah penulis fokus kepada Kebijakan Pengadaan Barang/Jasapada masa pandemic covid-19 di RSUD Gunung Tua pada Pemerintah daerah kabupaten Padang Lawas Utara

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa padamasa Pandemi Covid-19 di RSUD Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara. dan faktor yang menjadi penghambat serta upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara dalam mengatasi implementasi kebijakan pengadaan Barang /jasa Di RSUD.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, sedangkan metode dalam pengumpulan data menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang dipakai peneliti untuk memperoleh data yaitu , wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data Primer, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 7 orang informan yang terdiri dari Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara, Kepala Sub Bagian Keuangan, Kepala Bidang Penunjang Medik dan Non Medik, Kepala Bidang Program, Kepala Bagian Tata Usaha, Staff Bagian Pengadaan, dan Masyarakat. Adapun data sekunder dalam penelitan ini adalah Anggaran PBJ dari DAK, refocusing APBD, dan dari BTT, dokumentasi foto kegiatan di lapangan yang berkaitan dengan kinerja pejabat dalam implementasi kebijakan pengadaan Barang/jasa. Adapun analisisnya menggunakan teknik model triangulasi yang dalam Sugiyono (2012 : 334). Model yang digunakan terdiri dari 3 komponen analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, verifikasi/kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini akan menjelaskan mengenai implementasi kebijakan pengadaan barang/ jasa pada masa pandemic covid-19 di RSUD Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara dengan menggunakan teori yang dikemukakan Edward III. Teori tersebut terdiri Komunikasi, Sumber Daya, disposisi, dan Struktur Birokrasi. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Persentasi Realisasi Refocusing

Berdasarkan alokasi Refocusing Anggran Tahun 2020 RSUD Gunung Tua dapat di jelaskan program/kegiatan yang di masukkan ke dalam dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020sebelum *refocusing* total anggaran untuk pengadaan barang di RSUD Gunung Tua berjumlah Rp.6.049.000.000 Ialu setelah di refocusing anggaranuntuk pengadaan barang dan jasa dialihkan untuk pengadaan barang dalam rangka penanganan pandemi Covid-19. Ternyata berdasarkan data menyampaikan selisih persentase realisasi pengadaan barang dari hasil refocusing adalah 5.05 % artinya anggaran yang terrealisasi sudah hampir mencapai 95 % yang tentunya anggaran pengadaan barang dalam penanganan Covid-19 sudah terlaksana.

3.2. Penggunaan BTT untuk kegiatan keadaan darurat

kabupaten Padang Lawas Utara merupakan salah satu kabupaten yangberada di Provinsi Sumatera Utara. dalam hal ini Kabupaten Padang Lawas Utara juga menindaklanjuti kedaruratan pandemi

Covid-19 ini, dengan dikeIuarkannya Surat Keputusan Bupati Padang Lawas utara Nomor 440/172/KPTS/2020 tentang penggunaan belanja tidak terduga untuk kegiatan keadaan darurat bencana non alam percepatan penanganan COVID-19 di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Utara sebesar Rp.2.447.694.720.

3.3. Fasilitas

Fasilitas yang di maksud, dalam teori Edward III dalam Agustino(2019:136) disini membahas tentang ketersediaan sarana dan prasarana fisik, misalnya ketersediaan ruang rapat, computer dan jaringan internet untuk mendukung dalam kebijakan pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan oleh RSUD Gunung Tua untuk penanganan Covid-19 di Kabupaten Padang Lawas Utara. Fasilitas-fasilitas merupakan salah satu bagian terpenting untuk menunjang kebutuhan pegawai dalam membantu melaksanakan tugas dan dalam menyimpan data.

3.4. Wewenang

Wewenang dalam Teori Edward III dalam Agustino (2019:136) menyangkut besaran jangkauan tugas yang dapat dilakukan oleh pejabat yang memiliki otoritas atau kekuasaan yang tinggi untuk mengeluarkan kebijakan setiap mengatasi masalah sehingga implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik, oleh karena itu wewenang ini akan berbeda- beda dari suatu program ke program lainnya. Implementasi kebijakan pengadaan barang dan jasa selama masa pandemic Covid-19 di RSUD Gunung Tua yang memiliki wewenang untuk mengimplementasikannya adalah PPK.

3.5. Diskusi Temuan Utama Lainnya

Pada Implementasi Kebijakan pengadaan barang dan jasa pada masa pandemic Covid-19 mulai dilaksanakan pada awal bulan April, mekanisme dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan Surat Edaran yang di keluarkan LKPP Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Tindak Lanjut Atas Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Terhadap Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Sebagai Dampak Keadaan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Sebagai Bencana Nasional Corona Virus Disease 2019 (Covid19) dan Surat Keputusan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 440/172/KPTS/2020 Tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Untuk Kegiatan Keadaan Darurat Bencana Non Alama Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa yang di alami dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pengadaan barang dan jasa pada masa pandemi Covid-19 oleh RSUD Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara yaitu status RSUD Gunung Tua yang belum BLUD sehingga proses pencairan anggaran masih melalui mekanisme daerah sehingga prosesnya lama, kemudian terkait dengan SDM nya yang masih kurangnya kesadaran dalam melakukan tugasnya yaitu menyediakan stok barang yang diperlukan saat menangani pasien Covid-19 di RSUD Gunung Tua yang mengakibatkan terkendalanya pendistribusian persediaan barang untuk penanganan Covid-19, dan dikarenakan kurangnya kesadaran SDM terkait pendistribusian persediaan pengadaan barang dan jasa

tersebut membuat pencatatan persediaan barang di gudang tempat barang untuk penanganan Covid-19 mengalami kendala yaitu tidak terkontrolnya pencacatan persediaan tersebut sehingga barang yang sudah di distribusikan dengan barang yang masih belum di distribusikan tidak di catat dan akhirnya pencatatan persediaan barang tersebut tidak teratur dan membuat kesulitan untuk petugas gudang mengetahui barang yang masih tersedia atau yang sudah habis.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian juga hanya dilakukan pada RSUD Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Mahmudi.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan implementasi kebijakan pengadaan Barang/Jasa pada tahun lainnya untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Direktur Rumah Sakit Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Alim Syahirul. 2021. *Analisis yang memengaruhi kinerja pengadaan barang/jasa dalam keadaan darurat wabah covid-19 dengan social distancing sebagai variable moderator*. Politeknik Keuangan Negara STAN

Marzuqi, Irfan. 2019. *Pengadaan alat Kesehatan sebagai upaya percepatan penanganan covid-19*. Universitas Airlangga

Sugiyono. 2013. *Manajemen Pengadaan Procurement Management*.

Bandung : Alfabeta.

Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Pengembangan Research andDevelopment* . Bandung : Alfabeta.

Triasti, Deby.2021. *Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19*. Universitas Narotama